

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DESA DUREN KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG

TITIS SRIMURNI, MILLATUS SHOLIHAH

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lumajang

E-mail : millasholihah30@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan dan Kerentanan Pangan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Negara Indonesia dari masa kemasa. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Salah satu program pemerintah yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT yang mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara mekanisme nontunai dengan menggunakan bantuan teknologi yang disebut dengan *e-voucher*, yang diharapkan mampu memberi kemudahan dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan non tunai (BPNT) di desa duren kecamatan klakah kabupaten lumajang baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti sebagai *key informan*. Lokasi penelitian yaitu di Desa Duren, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator BPNT belum maksimal dalam penyelenggaraannya, dari segi ketepatan sasaran program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program. Berdasarkan hal tersebut hendaknya melakukan pendataan ulang, edukasi dan sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mengoptimalkan pelayanan program BPNT dan melakukan pemantauan terhadap terselenggaranya program BPNT agar program tepat sasaran dan berjalan efektif.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, BPNT

ABSTRACT

Poverty and Food Vulnerability is one of the challenges faced by the State of Indonesia from time to time. Poverty is a condition in which a person feels unable to fulfill his basic needs such as basic needs which include the needs of clothing, food, and housing. One of the government programs is the Non-Cash Food Assistance/BPNT whose implementation mechanism is carried out by a non-cash mechanism using technological assistance called e-vouchers, which is expected to be able to provide convenience and be right on target. This study aims to determine how the implementation of the non-cash assistance program (BPNT) in Duren Village, Klakah District, Lumajang Regency, both simultaneously and partially. The research method used is descriptive qualitative. Determination of informants using purposive sampling technique where the researcher is the key informant. The research location is in Duren Village, Klakah District, Lumajang Regency. The results showed that several BPNT indicators were not optimal in their implementation, in terms of the accuracy of program targets, achievement of program objectives and program monitoring. Based on this, it is necessary to carry out data collection, education and socialization of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program, optimize BPNT program services and monitor the implementation of the BPNT program so that the program is right on target and runs effectively.

Keywords: Public Policy, Implementation, BPNT

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penanganan Fakir Miskin dijelaskan dalam Undang-undang No 13 Tahun 2011 bahwa berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pelayanan sosial, derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan serta pekerjaan dan kesempatan berusaha. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak fakir miskin tersebut dengan melakukan penanganan fakir miskin dengan asas kemanusiaan, Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2021 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras 15 Kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.600,- per kg dititik distribusi atau penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu.

Sistem yang dipakai dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang multi fungsi, yaitu sebagai *e-wallet* yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan serta berfungsi sebagai kartu tabungan. Desa Duren Kecamatan Klakah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 323 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Prpgram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini disalurkan melalui e-Warong yang ada di di Desa Duren. Meninjau dari proses pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Duren masih terdapat beberapa permasalahan seperti masih kurang tepat sasaran. Masih terdapat permasalahan dalam proses pendataan dan input dokumen sehingga hal ini menyebabkan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kurang tepat sasaran sehingga mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan. Berdasarkan latar belakang di atas, melihat betapa pentingnya, program BPNT bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga dalam proses pelaksanaan dibutuhkan sosialisasi, ketepatan dan tanggungjawab yang maksimal dari penyelenggara program dalam penyaluran batuan BPNT dan dalam hal ini salah satu pelaksana adalah perangkat desa. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Duren Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Desa Duren, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti sebagai *key informan*. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan koumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Wawancara dengan Informan

Pada pembahasan pada analisis hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa tokoh yang sudah dikelompokkan dalam beberapa kategori, kategori kelompok tersebut terdiri dari kategori informan ahli, kategori informan kunci dan kategori informan pendukung. Peneliti melakukan pemaparan terkait dengan hasil temuan lapangan pada penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Duren, Kecamatan Klakah. Kategori informan ahli pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Informan Ahli

No	Nama Keterangan	Jabatan
1	Supriyono	Kades Duren
2	Tomy Yaser Arafat	Kaur Kesra
3	Evres Indra Lesmana	TKSK

Tabel : Informan Ahli hasil olahan peneliti, 2022.

Dari ketiga informan ahli tersebut peneliti berpedoman pada lembar interview guide yang telah disusun berdasarkan indikator implementasi Program BPNT. Informan ahli ini ditentukan berdasarkan tingkat pengetahuan individu atas permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, sehingga menjadi subyek yang paling dekat dengan masalah dalam penelitian ini. Bapak Supriyono selaku Kepala Desa Duren yang peneliti temui pada Senin, 25 Agustus 2022 pukul 10.15 WIB di Kantor Balai Desa Duren mengatakan bahwa “Dari tahun 2017 sudah ada BPNT di Desa Duren. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebesar Rp.110.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik bantuan pangan.

Kemudian, untuk pendaftaran penerima manfaat, bapak Supriyono mengatakan bahwa “ untuk pelaksanaannya keluarga penerima manfaat (KPM) mengambil nomor antrian. , menunggu giliran sambil mempelajari materi sosialisasi mengenai program bantuan pangan non tunai. Setelah dipanggil, keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menuju petugas desa/kelurahan dengan membawa surat pemberitahuan dan dokumen identifikasi. Petugas kelurahan mencocokkan kesesuaian data daftar penerima manfaat (DPM) dengan dokumen identitas yang dibawa oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian ya keluarga penerima manfaat (KPM) menuju meja petugas bank. “

Dari hasil pemaparan bapak Supriyono selaku kepala desa duren dapat disimpulkan bahwa:” program BPNT yang disalurkan sudah tepat sasaran karena perangkat desa sudah melakukan tugas sesuai arahan pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, bahwa yang mendapatkan BPNT ini adalah keluarga miskin, sesuai dengan indikator PKH yang dapat dijadikan sebagai acuan.. Selain kategori miskin, rumahnya jelek dan tidak layak, bisa juga lansia, ibu hamil maupun anak sekolah dari PAUD sampai SMA. Kami ini kan pemerintah desa yang menjalankan aturan level bawah ya, nah untuk termasuk pendataan BPNT ini sesuai aturan pemerintah itu ya Permensos No. 10 Tahun 2017 dan Permensos No. 25 Tahun 2016 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat (KPM).”

2. Hasil Wawancara dengan Informan Pendukung

Peneliti melakukan pemaparan terkait dengan hasil temuan lapangan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Duren, Kecamatan Klakah. Berdasarkan hasil pengelompokan kategori informan pendukung, Kategori informan pendukung pada penelitian ini terdiri dari:

Tabel 2. Informan Pendukung

No	Nama	Keterangan
1	Purwanto	Kepala Dusun Darungan Kidul
2	Yiyin Hartanto	Kepala Dusun Darungan Lor
3	Kusnadi	Kepala Dusun Darungan Wetan
4	Rohmad	Kepala Dusun Darungan Krajan

Tabel : informan pendukung hasil olahan peneliti, 2022.

Informan pendukung ini merupakan orang yang mengetahui tentang fokus permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Informan ini bisa diperoleh di wilayah penelitian yang dilakukan. Pada informan pendukung ini peneliti menentukan kepala dusun sebagai aktor untuk dimintai informasi yang berkaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Duren, Kecamatan Klakah. Kepala dusun ini terdiri dari 4 dusun yang ada di Desa Duren, sehingga hal ini bertujuan agar peneliti memperoleh data yang komprehensif. Kepala Dusun menjadi obyek responden karena memiliki andil dalam terselenggaranya program program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Duren, Kecamatan Klakah. Karena peran kepala dusun adalah menampung keluhan dan aspirasi dari warganya kemudian nantinya akan di sampaikan kepada pemerintah desa. Hal ini merupakan salah satu penerapan fungsi dan pola komunikasi organisasi bersifat *bottom up*.

Bapak Purwanto menjelaskan beberapa permasalahan yang dialami warganya terkhusus di Dusun Darungan Kidul. Beliau menerima keluhan masyarakat terkait dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Duren, Kecamatan Klakah. Ada beberapa warga yang tidak tahu bagaimana kriteria perangkat desa dalam menentukan penerima BPNT karena kondisi real dilapangan ada beberapa masyarakat darungan lor kidul yang dianggap mampu tapi menerima bantuan tersebut.

Berdasarkan pemaparan bapak Purwanto tersebut peneliti mengkonklusikan bahwa program ini tidak tepat sasaran, hal ini sesuai dengan indikator teori keefektifitas suatu program. Salah satu indikator dari penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu keluarga yang berasal dari kalangan tidak berada atau biasa disebut miskin namun berdasarkan temuan lapangan dan hasil wawancara dengan kepala dusun yang berwujud aspirasi dan keluhan masyarakat mengemukakan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak layak menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikarenakan faktor ekonomi yang memadai

3. Pembahasan

Dalam kebijakan public ada tahap yang harus dinilai untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memberikan terhadap sebuah permasalahan. Implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Karena peneliti ingin mengukur bagaimana implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) maka dalam penelitian ini menggunakan indicator sebagai berikut.

1. Ketetapan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Pencapaian tujuan program

4. Pemantauan Program.

1. Ketepatan sasaran program bantuan pangan non tunai (BPNT)

Setiap program yang dibuat oleh pemerintah diupayakan agar dapat tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Pada bagian ini Budiani mengemukakan bahwa ketepatan sasaran dalam implementasi dapat dilihat dari sejauhmana pelanggan atau penerima program tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Evres selaku TKSK bahwa, *“Sasaran dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaannya, itu berdasarkan buku pedoman BPNT. Ketepatan sasaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh pada saat pendataan peserta/ calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).”*

Kesesuaian antara tujuan program dan sasaran peserta program mempengaruhi keberhasilan program. Adapun yang menjadi sasaran dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, yakni:

1. Sasaran pelayanan e-Warong KUBE PKH adalah sebagai berikut
 - a. Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (penerima bantuan sosial peserta program keluarga harapan, penerima bantuan pangan non tunai)
 - b. Penerima bantuan subsidi gas elpiji
2. Masyarakat miskin penerima bantuan sosial lainnya, diantaranya:
 - a. Penerima bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif)
 - b. Anggota kelompok KUBE
3. Masyarakat sekitar

Sasaran dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah orang-orang yang termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau orang-orang kurang mampu. Sumber data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM).

Ketepatan sasaran penerima program atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Klakah yang sesuai dengan sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 sudah mulai dirasakan oleh sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Duren. Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih kurang tepat sasaran, karena masih ada masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan tetapi tidak mendapatkannya sama sekali, melainkan yang tidak berhak atas bantuan ini atau dikatakan mampu yang mendapatkan bantuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mendapatkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, maka peneliti menginterpretasikan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program belum dilakukan dengan maksimal. Masyarakat masih ada yang mengeluhkan terkait ketepatan sasaran penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Masalah ketepatan sasaran penerima bantuan atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) salah satunya disebabkan pada pendataan awal pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Seharusnya pada pendataan dilakukan merata dan sesuai dengan kriteria sasaran dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga yang menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan.

2. Sosialisasi Program bantuan pangan non tunai (BPNT)

Sosialisasi program merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan oleh Petugas terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memberikan manfaat yang nyata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terutama kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki kendala dalam pencairan bantuannya, yaitu terkait masalah saldo pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

3. Pencapaian Tujuan Program bantuan pangan non tunai (BPNT)

Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. Pada bagian ini Budiani mengemukakan bahwa pencapaian tujuan program dalam pengukuran efektivitas program dapat dilihat dari sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan sebuah program harus mampu termanifestasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga keefektifan suatu program dapat diukur dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut.

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat benar-benar dirasakan dampaknya oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) jika dalam penyalurannya benar-benar efektif dan tepat sasaran, sehingga tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai dapat tercapai secara keseluruhannya. Karena jika dalam penyalurannya benar-benar lancar, ini akan sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dari hasil wawancara tersebut, maka peneliti menginterpretasikan bahwa pada indikator pencapaian tujuan belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat masih adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lancar dalam penerimaan bantuannya. Namun ada juga beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lancar dalam penerimaan bantuannya dan tidak memiliki hambatan sama sekali. Dalam hal ini diharapkan agar dapat diperbaiki system sehingga manfaat dan tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal.

4. Pemantauan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan program publik. Kewajiban ini dapat dilakukan jika pemerintah mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan dan program itu sendiri. Sistem pemantauan dan evaluasi yang berfungsi dengan baik adalah alat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pada bagian ini Budiani mengemukakan bahwa pemantauan program dalam pengukuran efektivitas program

dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Secara spesifik, pemantauan dan evaluasi bertujuan menghasilkan informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan dan program, mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan pelayanan dan program, memberikan penilaian terhadap keberhasilan pelayanan dan program baik dari segi output, manfaat maupun dampaknya dan menjelaskan keberhasilan, kekurangan atau kegagalan pelayanan dan program.

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, peneliti menginterpretasikan bahwa pada indikator pemantauan program belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat tidak meratanya kegiatan pemantauan program yang dilakukan petugas. Bahkan ada KPM yang tidak mengetahui sama sekali untuk melapor ke siapa. Dalam hal ini diharapkan agar dapat dilakukan perbaikan dalam perbaikan program. Sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Indikator ketepatan sasaran belum dilakukan dengan maksimal. Masyarakat masih ada yang mengeluhkan terkait ketepatan sasaran Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Masalah ketepatan sasaran penerima bantuan atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) salah satunya disebabkan pada pendataan awal adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2. Sosialisasi Program

Indikator sosialisasi program yang dilakukan cukup maksimal. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Klakah sebagian besar sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diadakan oleh petugas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengetahui tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

3. Pencapaian Tujuan Program

Indikator pencapaian tujuan belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat masih adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lancar dalam penerimaan bantuannya. Namun ada juga beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lancar dalam penerimaan bantuannya dan tidak memiliki hambatan sama sekali.

4. Pemantauan Program

Indikator pemantauan program belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat tidak meratanya kegiatan pemantauan program yang dilakukan petugas. Bahkan ada KPM yang tidak mengetahui samasekali untuk melapor ke siapa. Dalam hal ini diharapkan agar dapat dilakukan perbaikan dalam perbaikan program. Sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Bandur, 2014. *Penelitian Kualitatif (Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data Dengan NVivo10)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ayu, Kartika., sutomo., & azhari, Kholik. 2020. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pancakarya Ajung Kabupaten Jember
- Budiani, Ni Wayan.2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran*
- Bugin Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Bugin Burhan, 2009. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana

- Kholif, Isnaini.K., Noor, K dan Siswidiyanto. *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.*
- Lexy J. Moleong, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lisa Horrison. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur. 2012. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muhammad Idrus. 2009 *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta : Erlangga.
- Riant Nugroho. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Saifuddin Azwar, 2007. *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Sugiyono, 2019. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, Bandung: Alfabeta
- Suharno, 2008. Program Keluarga Harapan (PKH) Memotong mata rantai kemiskinan anak bangsa. Pendidikan Pasca Sarjana spesialis-1. Pekerja Sosial STKS Bandung.
- Virgoreta, D.A., Pratiwi, N.R., & Suwondo . 2015. Implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban).